

**Keputusan Wali Kota
No. 000.7.2/446/2025**

Lampiran II



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

SEKRETARIAT DPRD

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SALATIGA**



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR **000.7.2/446/2025**

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dengan sistematika terdiri atas:

a. Bab I : Pendahuluan;

b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

a. Bab III : Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan; dan

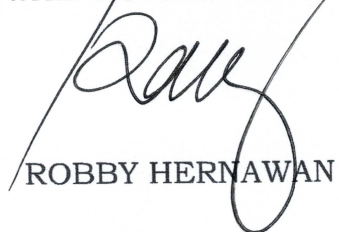
b. Bab IV : Penutup.

- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:
- a. Lampiran I : Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Lampiran II : Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
 - c. Lampiran III : Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Lampiran IV : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - e. Lampiran V : Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Lampiran VI : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Lampiran VII : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Lampiran VIII : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Lampiran IX : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Lampiran X : Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
 - k. Lampiran XI : Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - l. Lampiran XII : Rencana Kerja Dinas Sosial;
 - m. Lampiran XIII : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - n. Lampiran XIV : Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - o. Lampiran XV : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - p. Lampiran XVI : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Lampiran XVII : Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. Lampiran XVIII : Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Lampiran XIX : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - t. Lampiran XX : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Lampiran XXI : Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
 - v. Lampiran XXII : Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
 - w. Lampiran XXIII : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - x. Lampiran XXIV : Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - y. Lampiran XXV : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - z. Lampiran XXVI : Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 - aa. Lampiran XXVII : Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - bb. Lampiran XXVIII : Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
 - cc. Lampiran XXIX : Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
 - dd. Lampiran XXX : Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
 - ee. Lampiran XXXI : Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.

- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal **04 NOV 2025**

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

**RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2026**

**SEKRETARIAT DPRD
KOTA SALATIGA**



KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 800/002.15

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, maka perlu dibentuk tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);

- 15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 6); Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 8);
- 16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 7);
- 17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2022 Nomor 10);
- 18. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 6);
- 19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
- a. melakukan pengumpulan data pendukung penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
 - b. melakukan pembahasan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
 - c. melakukan pengumpulan data dan pembahasan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
 - e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal : 27 Januari 2025

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA



AGUNG NUGROHO

The image shows a circular official stamp of the DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) of Salatiga. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA SALATIGA' around the perimeter and 'SET. DPRD' in the center. A blue ink signature is written over the stamp, extending to the right towards the name 'AGUNG NUGROHO'.

Tembusan :

1. Wali Kota Salatiga (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
4. Kepala BPKPD Kota Salatiga.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM KOTA SALATIGA
NOMOR : 800/002.15
TANGGAL : 27 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM BADAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Penasehat
2.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Anggota
5.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Perisalah Ahli Muda	Anggota
8.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
11.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Pelaksana pada Bagian Umum dan keuangan	Anggota

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA



AGUNG NUGROHO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2024 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Capaian
Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024..... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 18

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Sekretariat DPRD 24

2.4 Review terhadap RKPD 28

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 37

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGATAN... 38

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 38

3.1.1 Telaahan Kebijakan Nasional..... 38

3.1.2 Telaahan Kebijakan Provinsi..... 39

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD 41

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Sekretariat DPRD 42

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 51

4.1 Rencana Program Sekretariat DPRD..... 51

4.2 Rencana Kegiatan Sekretariat DPRD 52

4.3 Rencana Sub Kegiatan Sekretaria DPRD 53

4.4 Target Kinerja Beserta Pendanaan 54

BAB. V PENUTUP 80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 dan
 Perkiraan Maju Tahun 2025 Kota Salatiga (T-C.29) 15

Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Salatiga 19

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga (T-C.30) 22

Tabel 2.4 Identifikasi Masalah Sekretariat DPRD Kota Salatiga 25

Tabel 2.5 Review terhadap RKPD Kota Salatiga Tahun 2025 dan Analisis
 Kebutuhan Sekretariat DPRD Tahun 2026 (T-C.31) 31

Tabel 2.6 Review terhadap RKPD Kota Salatiga Tahun 2025 dan Analisis
 Kebutuhan Sekretariat DPRD Tahun 2026 36

Tabel 2.7 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku
 Kepentingan (T-C.32) 37

Tabel 3.1 Perumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat DPRD
 Kota Salatiga Tahun 2026 41

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Prioritas Sekretariat DPRD Kota Salatiga 45

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun
 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Salatiga (T-C.33) 48

Tabel 4.1 Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
 (Renja OPD) Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026..... 56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD. Selain itu, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan agar seragam dan selaras dengan proses penganggaran serta evaluasi kinerja.

Secara definisi, Renja Sekretariat DPRD adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029, mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, serta selaras dengan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029. Dengan demikian, Renja memiliki posisi yang strategis sebagai dokumen operasional tahunan perangkat daerah untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah.

Gambaran kondisi yang mendasari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran vital sebagai unsur pelayanan administrasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Pada tahun 2025, Sekretariat DPRD telah menunjukkan sejumlah capaian, antara lain:

1. Aspek Dukungan Administrasi DPRD

Penyelenggaraan persidangan, rapat-rapat, serta penyusunan produk hukum DPRD terlaksana dengan baik, meskipun masih diperlukan peningkatan efektivitas koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

2. Aspek Pelayanan dan Fasilitasi

Fasilitasi komunikasi politik, publikasi, dan dokumentasi kegiatan DPRD semakin terbuka dan partisipatif. Namun, ekspektasi masyarakat terhadap

pelayanan informasi publik semakin tinggi, sehingga diperlukan inovasi pelayanan berbasis digital.

3. Aspek Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Kapasitas aparatur secara umum cukup memadai, tetapi peningkatan kompetensi khususnya dalam mendukung digitalisasi pelayanan administrasi masih perlu diperkuat. Sarana prasarana perkantoran juga perlu pemeliharaan dan pengembangan untuk menunjang efisiensi kerja.

4. Aspek Tata Kelola dan Akuntabilitas

Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan tren positif, namun konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja masih harus terus ditingkatkan agar selaras dengan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan kualitas pelayanan administrasi, mendukung profesionalisme DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Adapun nilai strategis Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 antara lain:

1. Menjadi instrumen untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam langkah tahunan yang terukur.
2. Menjamin sinkronisasi, keterpaduan, dan kesinambungan antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan Kota Salatiga.
3. Mengarahkan program dan kegiatan Sekretariat DPRD agar selaras dengan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029 dan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029.
4. Memastikan terselenggaranya pelayanan administratif, fasilitasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD secara profesional, efektif, dan efisien.
5. Memberikan dasar evaluasi kinerja tahunan Sekretariat DPRD sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan demikian, penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 bukan hanya merupakan kewajiban normatif sesuai amanat regulasi, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk memperkuat dukungan kelembagaan DPRD, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, dan mendukung terwujudnya sasaran pembangunan Kota Salatiga sesuai RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 nomor 7);
21. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 nomor 6);
22. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2025 nomor 25).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Dokumen Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 adalah mendokumentasikan perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang selaras dengan Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029. Penyusunan Renja ini dimaksudkan pula sebagai instrumen perencanaan operasional jangka pendek yang berfungsi menjembatani arah kebijakan jangka menengah dengan pelaksanaan kegiatan tahunan. Dengan adanya Renja, diharapkan tercipta keselarasan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra dengan kebutuhan nyata serta prioritas pembangunan pada Tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 adalah:

1. Menjabarkan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029 ke dalam rencana operasional tahunan yang menjadi pedoman kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026.
2. Memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026, sekaligus menetapkan target kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2026 disusun secara terstruktur untuk memudahkan pemahaman terhadap isi dokumen. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai latar belakang penyusunan Renja, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan dokumen.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2025). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun-tahun sebelumnya..

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
- 2.4 Review terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan tahunan Sekretariat DPRD, indikator kinerja yang akan dicapai, serta rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2026 yang selaras dengan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029 dan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029.

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Berisi uraian tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 yang merupakan bagian dari upaya pemenuhan kinerja urusan yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD. Rumusan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk tabel yang memuat Kode, Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, serta Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif. Seluruh data diperoleh dari hasil penginputan pada aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD-RI) dengan alamat: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi dokumen perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap dokumen perencanaan harus melalui proses evaluasi untuk menilai kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaannya, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang dihadapi.

Dasar hukum yang lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi terhadap Renstra maupun Renja Perangkat Daerah. Selain itu, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menjadi acuan dalam penyeragaman nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sehingga memudahkan proses evaluasi dan pelaporan.

Secara kelembagaan, evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga juga mengacu pada Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD, yang menetapkan tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai landasan dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja.

Berdasarkan kerangka regulasi tersebut, evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2024 serta perkiraan capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD mampu satu urusan, yaitu Urusan Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sekretariat DPRD melaksanakan 2 (dua) program, 20 (dua puluh) kegiatan, dan 60 (enam puluh) sub kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan menilai ketercapaian indikator kinerja, target program dan kegiatan, serta efektivitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar target telah tercapai dengan capaian rata-rata di atas 95%, meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan penyampaian dokumen dari eksekutif, keterbatasan anggaran akibat penyesuaian fiskal, serta tantangan adaptasi terhadap dinamika regulasi dan kebutuhan pelayanan DPRD yang terus berkembang.

Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengharuskan setiap dokumen perencanaan dievaluasi secara periodik. Selain itu, penyusunan dan pelaksanaan Renja juga berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020, yang mengatur klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD pada Tahun 2024 secara umum menunjukkan kinerja yang baik, dengan rata-rata realisasi capaian kinerja lebih dari 95% dari target. Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Salatiga mampu 1 (satu) urusan, yaitu Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan, yang dijabarkan ke dalam 2 (dua) program, 20 (dua puluh) kegiatan, dan 60 (enam puluh) sub kegiatan. Seluruh program dan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta representasi DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Secara umum, capaian Renja 2024 menunjukkan bahwa:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah mampu memberikan dukungan yang memadai terhadap kelancaran administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik daerah, serta penyediaan layanan umum lainnya bagi DPRD.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD juga telah berjalan optimal dengan capaian kinerja yang relatif tinggi, meliputi fasilitasi penyusunan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran, fungsi pengawasan, peningkatan kapasitas DPRD, serta penyerapan aspirasi masyarakat.
3. Beberapa kegiatan strategis, seperti fasilitasi pembahasan KUA–PPAS, APBD, serta pelaksanaan reses DPRD, terlaksana dengan capaian target yang baik dan berkontribusi terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Memasuki tahun 2025, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD 2025–2029 sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Salatiga 2025–2029, maka perencanaan dan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD diselaraskan dengan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut. Perkiraan capaian tahun 2025 diproyeksikan akan meningkat, seiring dengan perbaikan tata kelola perencanaan, penyesuaian nomenklatur kegiatan, serta dukungan penuh dari pimpinan dan anggota DPRD

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan diperkirakan tetap berjalan dengan capaian kinerja di atas 95% dari target. Fokus tahun 2025 diarahkan pada:

1. Penyesuaian struktur kegiatan dengan nomenklatur baru sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050 Tahun 2020.
2. Optimalisasi dukungan fasilitasi DPRD dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, yang diproyeksikan mencapai target awal Renstra.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD, terutama melalui peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan tata kelola administrasi.

Dengan capaian tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa tren kinerja Sekretariat DPRD menunjukkan arah positif menuju pencapaian target Renstra 2025–2029. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi hingga tahun 2025, antara lain:

1. Keterbatasan SDM sekretariat yang belum berbanding lurus dengan volume dan intensitas kegiatan DPRD.
2. Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal, sehingga beberapa kegiatan fasilitasi DPRD membutuhkan waktu lebih panjang dalam penyelesaian.
3. Beban kerja yang tinggi dan dinamis karena agenda DPRD sering bersifat mendadak dan membutuhkan dukungan segera dari Sekretariat DPRD.
4. Keterbatasan data dan informasi yang terintegrasi, sehingga proses penyusunan laporan dan evaluasi membutuhkan waktu lebih lama.
5. Tingkat partisipasi masyarakat yang masih beragam dalam proses penyerapan aspirasi DPRD, sehingga penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD belum sepenuhnya merata mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Salatiga telah mampu menjalankan fungsi dukungan terhadap DPRD dengan cukup optimal, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029.

Hasil evaluasi memuat kajian terhadap realisasi kinerja Sekretariat DPRD tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Pada Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Salatiga mengampu satu urusan yaitu Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan yang terbagi dalam 2 (dua) Program, 20 (dua puluh) Kegiatan dan 60 (enam puluh) Sub Kegiatan. Selengkapnya sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.
- 9. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.
- B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - 1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan.
 - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik;
 - e. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD.
 - 2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - a. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS;
 - b. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Sub Kegiatan Pembahasan APBD;
 - d. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan;
 - e. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester;
 - f. Sub Kegiatan Pertanggungjawaban APBD.
 - 3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - a. Sub Kegiatan pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
 - c. Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
 - d. Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan;
 - e. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran;

- f. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- 4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 - a. Sub Kegiatan Orientasi DPRD;
 - b. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
 - f. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD;
 - g. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD.
- 5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD;
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses
- 6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasab Kode Etik DPRD
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD
- 7. Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Vertifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.
- 8. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
 - b. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi PTelaksanaan Tugas badan Musyawarah;
 - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD;
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus.

Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Salatiga melaksanakan 2 program, 20 kegiatan, dan 60 sub kegiatan sesuai dengan urusan pemerintahan bidang penunjang. Secara keseluruhan, tingkat capaian kinerja Renja tahun 2024 berada pada kisaran 85–95% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan pelaksanaan program berjalan relatif optimal meskipun terdapat beberapa kendala teknis.

Untuk mengetahui pelaksanaan atas Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2024 dan perkiraan tahun 2025, berikut disajikan tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kota Salatiga

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4 02						SEKRETARIAT DPRD									
4 02	01					PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARITA DPRD KABUPATEN/KOTA AATAU PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitasi Pelayanan Kesekretariatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)								
4 02	01	2	01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	300	300%
4 02	01	2	01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	10	10	10	100%	10	30	300%
4 02	01	2	02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	300	300%
4 02	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	27	27	27	100%	27	81	270%
4 02	01	2	02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1	1	100%	1	3	300%
4 02	01	2				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	300	300%
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	2	2	2	100%	2	6	600%
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	8	8	8	100%	8	24	300%
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	4	4	4	100%	4	12	300%
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	4	4	4	100%	4	12	300%
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	4	4	4	100%	4	12	300%
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	4	4	4	100%	4	12	300%
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	4	4	4	100%	4	12	300%
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	300%
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	1	1	100%	1	3	300%
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	100%	0	2	200%
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintahan	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	300	300%
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5	5	5	5	100%	5	15	300%
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	3	0	0%	0	0	0%
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	300	300%
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	100%	1	3	300%
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	300%
						Penyediaan Jasa Pelayanan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	1	1	100%	1	3	300%
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100%	100	300	300%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	17	17	100%	17	51	300%
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	2	2	2	100%	2	6	300%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	5	5	100%	5	15	300%
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2	2	2	100%	2	6	300%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	4	100%	4	12	300%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	100%	1	3	300%
		Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	100	100	100%	100	300	300%
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25	25	25	100%	25	75	300%
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2	2	2	100%	2	6	300%
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah paket Medical Check Up yang disediakan	1	1	1	100%	1	3	300%
		Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Capaian Layanan Administrasi DPRD							
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1	1	1	100%	1	3	300%
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4	4	4	100%	4	12	300%
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								
		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	100	100	100%	100	300	300%
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	4	4	4	100%	4	12	300%
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4	4	4	100%	4	12	300%
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan/dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4	4	4	100%	4	12	300%
		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	100	100	100%	100	300	300%
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1	1	100%	1	3	300%
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1	1	100%	1	3	300%
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	1	100%	1	3	300%
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1	1	1	100%	1	3	300%
		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Semester							
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	1	100%	1	3	300%
		Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100	100	100	100%	100	300	300%
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintah dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1	1	1	100%	1	3	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1	1	1	1	100%	1	3	300%
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1	1	1	1	100%	1	3	300%
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh	1	1	1	1	100%	1	3	300%
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	0	1	0	0%	1	1	100%
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1	1	1	100%	1	3	300%
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Peningkatan Kapasitas DPRD	100	100	100	100	100%	100	300	300%
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1	1	1	1	100%	1	3	300%
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi	1	1	1	1	100%	1	3	300%
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4	4	4	4	100%	4	12	300%
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	4	4	4	4	100%	4	12	300%
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	1	1	1	100%	1	3	300%
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	1	1	1	100%	1	3	300%
		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	100	100	100	100%	100	300	300%
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	1	1	1	100%	1	3	300%
		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1	1	1	1	100%	1	3	300%
		Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	100	100	100	100%	100	300	300%
		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik DPRD	0	0	0	0	0%	0	0	0%
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	1	1	1	100%	1	3	300%
		Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Capaian Pembahasan Kerja Sama Daerah	100	100	100	100	100%	100	300	300%
		Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja	1	0	1	0	0%	1	1	100%
		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja	1	0	1	0	0%	1	1	100%
		Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Fasilitasi Tugas DPRD	100	100	100	100	100%	100	300	300%
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1	1	1	1	100%	1	3	300%
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	1	1	1	100%	1	3	300%
		Fasilitasi Pelaksaasn Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1	1	1	1	100%	1	3	300%
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1	1	1	1	100%	1	3	300%
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1	0	1	0	0%	1	1	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Salatiga ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2024, yang terdiri Sekretaris DPRD dan 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Umum dan Keuangan; Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
2. Bagian Umum dan Keuangan merupakan unsur pelaksana di bagian umum dan keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD di lingkup perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan merupakan unsur pelaksana di bidang persidangan dan perundang-undangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
 - 1) Pejabat Fungsional; dan
 - 2) Pejabat Pelaksana.

Susunan Organisasi Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan tugas dan fungsi terbagi atas 2 (dua) Kelompok Substansi yang terdiri atas:

 - 1) Kelompok Substansi Persidangan, Risalah dan Publikasi; dan
 - 2) Kelompok Subtansi Kajian Perundang-undangan.
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan merupakan unsur pelaksana di bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
 - 1) Pejabat Fungsional; dan
 - 2) Pejabat Pelaksana.

Susunan Organisasi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan tugas dan fungsi terbagi atas 2 (dua) Kelompok Substansi yang terdiri atas:

- 1) Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran; dan
 - 2) Kelompok Substansi Fasilitasi Pengawasan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:
- (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Sekretaris DPRD; Kepala Bagian, atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
 - (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
6. Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pembinaan dan pengembangan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Salatiga pada dasarnya telah berjalan sesuai tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing bagian/unit kerja. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala yang memerlukan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, serta dukungan sistem dan teknologi informasi. Analisis kinerja pelayanan pada masing-masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Salatiga

BAGIAN/UNIT	FOKUS KINERJA PELAYANAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENDUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat DPRD	Administrasi kesekretariatan, keuangan, dukungan tenaga ahli, koordinasi lintas bagian	Koordinasi lintas bagian belum sepenuhnya optimal; keterbatasan tenaga ahli khusus	Regulasi Perwali 6/2024, dukungan anggaran, komitmen pimpinan

BAGIAN/UNIT	FOKUS KINERJA PELAYANAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENDUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)
Bagian Umum & Keuangan	Administrasi umum & kepegawaian, pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran	Keterbatasan SDM fungsional perencanaan & keuangan; beban administrasi tinggi	Sistem administrasi & keuangan terstandar, dukungan teknologi informasi
Bagian Persidangan & Perundang-undangan	Dukungan persidangan, risalah, publikasi, kajian hukum & perundang-undangan	Beban kerja tinggi saat pembahasan Perda; keterbatasan tenaga ahli hukum	Sistem informasi persidangan, dukungan publikasi, komitmen penyusunan produk hukum daerah
Bagian Fasilitas Penganggaran & Pengawasan	Fasilitasi pembahasan anggaran, dukungan pengawasan, penyediaan data & laporan	Basis data lintas OPD belum terintegrasi; keterlambatan data pelaksanaan APBD	Dukungan teknis Badan Anggaran DPRD, kerjasama OPD terkait
Kelompok Jabatan Fungsional	Kajian teknis, penyusunan dokumen, publikasi, arsip, analisis kebijakan	Jumlah & kapasitas fungsional terbatas dibanding kebutuhan pelayanan	Profesionalitas fungsional yang ada, peluang pengembangan kapasitas

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025

- 1. Sekretariat DPRD**

Fokus utama pelayanan meliputi administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dukungan tenaga ahli, serta koordinasi lintas bagian. Permasalahan yang muncul adalah belum optimalnya koordinasi antarbagian serta keterbatasan tenaga ahli yang memiliki spesialisasi tertentu. Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung berupa keberadaan regulasi melalui Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2024, dukungan anggaran daerah, serta komitmen pimpinan dalam meningkatkan tata kelola kelembagaan.
- 2. Bagian Umum dan Keuangan**

Bagian ini berfokus pada administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta perencanaan anggaran. Permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia fungsional di bidang perencanaan dan keuangan serta tingginya beban administrasi rutin. Namun, terdapat faktor pendukung berupa sistem administrasi dan

keuangan yang sudah terstandar serta pemanfaatan teknologi informasi yang dapat memperlancar proses pelayanan.

3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian ini memiliki fungsi pelayanan dalam mendukung kelancaran persidangan, pembuatan risalah, publikasi, serta kajian hukum dan perundang-undangan. Beban kerja tinggi khususnya pada masa pembahasan peraturan daerah menjadi kendala utama, ditambah dengan keterbatasan tenaga ahli di bidang hukum. Meski demikian, tersedianya sistem informasi yang memberikan dukungan publikasi, serta komitmen dalam penyusunan produk hukum daerah menjadi faktor yang memperkuat pelaksanaan pelayanan.

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Fokus pelayanan terletak pada fasilitasi pembahasan anggaran, dukungan fungsi pengawasan DPRD, serta penyediaan data dan laporan terkait APBD. Permasalahan yang muncul adalah belum terintegrasinya basis data lintas perangkat daerah serta seringnya keterlambatan data pelaksanaan APBD. Namun demikian, dukungan teknis dari Badan Anggaran DPRD serta kerjasama dengan perangkat daerah terkait menjadi faktor pendukung yang signifikan untuk peningkatan pelayanan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok ini berperan dalam penyusunan kajian teknis, dokumen, publikasi, arsip, serta analisis kebijakan. Kendala utama adalah keterbatasan jumlah serta kapasitas pejabat fungsional yang belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan. Namun, profesionalitas fungsional yang ada serta peluang pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan ke depan.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Indikator Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada tahun 2024 terealisasi sebesar 94,54%, sedikit menurun dibanding capaian tahun 2023 sebesar 97,86%. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh tingginya beban fasilitasi pada masa pembahasan kebijakan daerah, keterbatasan tenaga ahli, serta kebutuhan dukungan data dan informasi lintas perangkat daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan rincian seperti dalam Tabel 2.2 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD berikut ini:

Tabel 2.3 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Sekretariat DPRD Kota Salatiga

NO	INDIKATOR	SPM	IKK/IKU	Target Renstra Sekretariat DPRD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	-	Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	100	100	100	97,86	94,54	100	100	Evaluasi Teknis pelaksaaan Kegiatan

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025

Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Salatig dengan Pelaksanaan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Salatiga selama periode evaluasi menunjukkan capaian yang relatif baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- IKU Sekretariat DPRD ditetapkan dalam bentuk *Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD*. Target Renstra 2022–2026 adalah 100% setiap tahun. Realisasi tahun 2024 sebesar 94,54%, atau masih terdapat deviasi sekitar 5,46% dari target. Capaian ini dipengaruhi oleh beban fasilitasi yang tinggi pada masa pembahasan Raperda dan keterbatasan tenaga ahli. Namun tren kinerja tetap positif dengan proyeksi 2025–2026 dapat mencapai 100% seiring penguatan SDM dan dukungan sistem informasi persidangan.
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Sekretariat DPRD tidak memiliki urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan SPM sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Dengan demikian, indikator pelayanan berbasis SPM tidak ditetapkan pada unit kerja ini.
3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat DPRD tidak memiliki IKK tersendiri karena fungsi sekretariat bersifat mendukung pelaksanaan tugas DPRD, bukan layanan langsung ke masyarakat.

Uraian Indikator yang Belum Memenuhi Target dari hasil evaluasi, indikator yang belum memenuhi target adalah IKU – Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tahun 2024, dengan capaian 94,54%. Faktor penyebab antara lain:

1. Beban kerja tinggi pada periode pembahasan Perda dan kegiatan DPRD lainnya.
2. Keterbatasan tenaga fungsional dan tenaga ahli bidang hukum serta keuangan.
3. Belum terintegrasinya basis data lintas OPD untuk mendukung fungsi pengawasan DPRD.

Upaya tindak lanjut untuk mencapai target ke depan meliputi:

1. Optimalisasi sistem informasi persidangan dan administrasi kesekretariatan.
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui rekrutmen tenaga fungsional dan pelatihan teknis.
3. Penguatan koordinasi lintas OPD dalam penyediaan data dan laporan pelaksanaan APBD.

Meskipun demikian, pencapaian tersebut tetap mencerminkan kinerja yang relatif tinggi, karena sebagian besar fungsi fasilitasi telah dapat dilaksanakan sesuai standar pelayanan. Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, terutama dalam rangka memperkuat dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Arah kebijakan Renja 2026 difokuskan pada:

1. Peningkatan kualitas fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi persidangan, pengelolaan dokumen, serta layanan administrasi yang lebih terintegrasi.
2. Penguatan kapasitas SDM, baik melalui penambahan tenaga fungsional maupun peningkatan kompetensi aparatur dalam mendukung kerja teknis, analisis kebijakan, dan penyusunan dokumen pendukung DPRD.
3. Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, terutama dalam penyediaan data dan laporan pelaksanaan APBD agar fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.
4. Pemantapan dukungan regulasi dan anggaran, dengan memanfaatkan payung hukum Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 sebagai dasar penguatan tata kelola kesekretariatan.

Dengan arah kebijakan tersebut, Renja 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen konsolidasi dan akselerasi pencapaian target Renstra hingga akhir periode perencanaan tahun 2026. Evaluasi capaian 2024 menjadi pelajaran penting bahwa konsistensi kinerja perlu didukung oleh peningkatan kapasitas SDM, integrasi data, serta komitmen kelembagaan agar target IKU 100% dapat terealisasi pada tahun-tahun berikutnya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi permasalahan serta penetapan isu strategis yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Permasalahan dan isu strategis ini dirumuskan berdasarkan telaahan terhadap dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023–2026, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi riil penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan DPRD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 serta Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD Kota Salatiga memiliki tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Salatiga menghadapi sejumlah permasalahan mendasar yang berpengaruh terhadap kinerja fasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD. Permasalahan utama adalah belum optimalnya kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD, baik dalam perancangan dan penetapan produk hukum daerah, penyusunan APBD, maupun fasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara lebih spesifik, permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan perancangan produk perundang-undangan, yang berdampak pada keterlambatan maupun kualitas produk hukum daerah.
2. Pelaksanaan penetapan peraturan daerah belum optimal, sehingga target jumlah perda yang ditetapkan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
3. Penyusunan dan penetapan APBD belum optimal, yang berimplikasi terhadap ketercapaian program prioritas daerah.
4. Pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan belum maksimal, sehingga DPRD belum sepenuhnya memperoleh dukungan fasilitasi yang memadai dari Sekretariat DPRD.

Permasalahan di atas menimbulkan implikasi serius terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Apabila tidak segera diatasi, kondisi ini dapat menghambat kualitas kebijakan daerah serta efektivitas pelaksanaan fungsi DPRD. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi tersebut alat ukur yang digunakan dengan metode analisis baik faktor penghambat maupun pendorong seperti tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.4
Identifikasi Masalah Sekretariat DPRD Kota Salatiga

No	Permasalahan Pelayanan	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya jumlah produk hukum yang disebabkan karena terbatasnya tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya	Kegiatan Sekretariat DPRD bersifat administratif, permasalahan utama yang dihadapi adalah jumlah produk hukum yang akan diajukan dan telah didampingi oleh tenaga ahli yang kompeten. Kompetensi tenaga ahli sesuai dengan kompetensi akademis menjadi masalah utama sehingga belum tercapai target. Persentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD pada tahun 2021 baru mencapai 88 persen.	1. Belum optimalnya pelaksanaan perancangan produk perundang-undangan. 2. Pelaksanaan penetapan peraturan daerah belum optimal. 3. Penetapan APBD belum optimal. 4. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan belum maksimal.

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025

Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 antara lain:

1. Penguatan fasilitasi fungsi DPRD dalam proses perancangan dan penetapan produk hukum daerah.
2. Optimalisasi peran Sekretariat DPRD dalam mendukung penyusunan dan penetapan APBD yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel.
3. Peningkatan efektivitas fasilitasi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Pengembangan sistem kerja yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan DPRD serta tantangan lingkungan strategis ke depan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD, serta menyediakan tenaga ahli sesuai kebutuhan DPRD. Dalam kerangka RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029, yang menekankan pada penguatan tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, terdapat sejumlah isu penting yang dihadapi Sekretariat DPRD, baik dari aspek internal maupun eksternal.

1. Isu yang Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:
 - 1) Terbatasnya pemanfaatan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, padahal RPJMD 2025–2029 mengarahkan percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah. Hal ini berimplikasi pada rendahnya efektivitas pelayanan administrasi dan dukungan teknis kepada DPRD.
 - 2) Belum optimalnya koordinasi antara Sekretariat DPRD dan DPRD, sehingga berpotensi menghambat efektivitas fasilitasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
 - 3) Program kerja yang belum konsisten, menunjukkan perlunya penyesuaian dengan arah kebijakan RPJMD yang menuntut sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terukur.

2. Isu Strategis yang Perlu Ditindaklanjuti
 - 1) Peremajaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
 - 2) Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran, guna menjamin efektivitas dukungan teknis dan administratif.
 - 3) Peningkatan kualitas SDM, baik aparatur sekretariat maupun tenaga ahli DPRD, sesuai dengan kebutuhan kompetensi berbasis digital dan penguasaan regulasi.
 - 4) Penerapan SOP secara konsisten, sebagai pedoman kerja dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja birokrasi.
 - 5) Peningkatan kualitas pelayanan dukungan kinerja DPRD, sehingga mampu menjawab tuntutan peran DPRD dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Salatiga 2025–2029.
3. Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis Terkait Pelayanan
 - 1) Keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga pelayanan administrasi belum sepenuhnya berbasis digital.
 - 2) Koordinasi dengan DPRD yang belum optimal, mengakibatkan beberapa kegiatan tidak sinkron dengan kebutuhan legislatif.
 - 3) Kualitas SDM belum sepenuhnya merata, terutama dalam penguasaan bidang teknis legislasi, keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi.
4. Permasalahan dan Hambatan
 - 1) Perubahan regulasi dan kebijakan yang cepat sering tidak diimbangi dengan kesiapan adaptasi kelembagaan dan kesiapan sumber daya maupun adaptasi administrasi, hal ini menuntut fleksibilitas tata kelola serta peningkatan kompetensi SDM dalam memahami dinamika regulasi
 - 2) SOP belum diterapkan secara konsisten sehingga kualitas pelayanan tidak selalu seragam.
5. Tantangan
 - 1) Kompleksitas tugas DPRD yang semakin meningkat, baik dalam legislasi, anggaran, maupun pengawasan.
 - 2) Tuntutan publik dan DPRD terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berbasis teknologi.
 - 3) Perubahan regulasi pusat maupun daerah yang dinamis dan perlu cepat direspon.

- 4) Meningkatnya kompleksitas kegiatan DPRD yang harus difasilitasi secara cepat dan tepat, sejalan dengan meningkatnya peran DPRD dalam pengawasan dan pembahasan kebijakan pembangunan daerah.
 - 5) Perubahan kebijakan yang dinamis, yang menuntut kesiapan kelembagaan untuk menyesuaikan prosedur dan layanan.
6. Peluang
- 1) Transformasi digital dalam pelayanan publik, yang dapat dimanfaatkan untuk modernisasi administrasi kesekretariatan DPRD.
 - 2) Dukungan kebijakan RPJMD 2025–2029 yang menekankan pada penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.
 - 3) Program peningkatan kapasitas SDM, baik melalui Bimtek, diklat, maupun kerja sama dengan perguruan tinggi/lembaga profesional.
 - 4) Kerja sama antar lembaga (eksekutif, legislatif, dan masyarakat) yang semakin terbuka untuk mendukung kinerja DPRD.
 - 5) Program peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis yang difasilitasi pemerintah daerah maupun pusat, yang sejalan dengan arah RPJMD dalam membangun birokrasi yang adaptif dan kompeten.

2.4. Review terhadap RKPD

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga merupakan langkah penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2026. Review ini bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi fasilitasi DPRD dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025–2029. Review terhadap RKPD Kota Salatiga dilakukan untuk menilai sejauh mana capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus mengidentifikasi permasalahan serta kebutuhan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026.

Melalui review ini, dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan yang telah diimplementasikan pada tahun sebelumnya, identifikasi permasalahan yang muncul, serta analisis kebutuhan untuk perencanaan tahun berikutnya. Dengan demikian, Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 dapat lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan

daerah. RKPD Kota Salatiga merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah pertama dalam kerangka pelaksanaan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah, termasuk Sekretariat DPRD, dalam menyusun rencana kerja yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Dalam implementasinya, capaian kinerja Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 masih menghadapi sejumlah kendala yang berimplikasi pada efektivitas fasilitasi fungsi DPRD. Dari hasil review RKPD 2025 tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Capaian kinerja Sekretariat DPRD telah cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal sesuai target RKPD.
2. Permasalahan utama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, sistem pendukung, dan koordinasi antar perangkat daerah.
3. Dampaknya adalah kualitas fasilitasi terhadap fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD belum maksimal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil review RKPD 2025, penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 diarahkan pada:

1. Penguatan kapasitas SDM dan tenaga ahli yang relevan dengan kebutuhan DPRD.
2. Peningkatan efektivitas fasilitasi legislasi, terutama dalam perancangan dan pembahasan produk hukum daerah.
3. Optimalisasi fasilitasi penyusunan dan penetapan APBD, dengan meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah serta memperkuat dukungan teknis.
4. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan DPRD, sehingga rekomendasi DPRD dapat ditindaklanjuti secara lebih terukur.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung agenda rapat, dokumentasi, dan penyusunan laporan DPRD agar lebih responsif terhadap dinamika pembangunan.

Proses review ini penting agar rencana kerja yang disusun tidak hanya berorientasi pada target tahunan, tetapi juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025–2029. Dengan

demikian, analisis kebutuhan tahun 2026 tetap berada dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025, masih terdapat beberapa capaian program dan kegiatan yang belum sepenuhnya optimal, terutama dalam fasilitasi fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Permasalahan tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan tenaga ahli yang kompeten, kurangnya dukungan teknis, serta belum optimalnya koordinasi lintas perangkat daerah.

Review terhadap RKPD Tahun 2026 dan Analisis kebutuhan Tahun 2026 sebagaimana tersaji dalam tabel 2.5 (T-C.31) sebagai berikut

Tabel 2.5 (T-C.31)
Review terhadap RKPD Tahun 2026 dan Hasil Analisis kebutuhan Tahun 2026

No	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				43.543.548.000	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				43.543.548.000	
I	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/ KOTA ATAU PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100 %	25.091.048.000	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/ KOTA ATAU PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100 %	25.091.048.000	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86,00 %				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86,00 %		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,00 %				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,00 %		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.000.000	
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 lap	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 lap	6.000.000	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.216.048.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.216.048.000	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 org	3.574.048.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 org	3.574.048.000	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	1.642.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	1.642.000.000	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	100 %	65.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	100 %	65.000.000	
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dok	65.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dok	65.000.000	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.480.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.480.000.000	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	15.000.000	
4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Salatiga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	50.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Salatiga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	50.000.000	
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	15.000.000	
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	50.000.000	

No	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8	9	10	11	12
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	30.000.000	
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Salatiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 dok	20.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Salatiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 dok	20.000.000	
4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 lap	500.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 lap	500.000.000	
4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lap	1.800.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lap	1.800.000.000	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	100.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	100.000.000	
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 unit	100.000.000	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 %	655.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 %	655.000.000	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	5.000.000	
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 lap	450.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 lap	450.000.000	
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan dan Perlengkapan Kantor	Salatiga	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 lap	200.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan dan Perlengkapan Kantor	Salatiga	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 lap	200.000.000	
6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 lap	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 lap	-	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	885.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	885.000.000	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salatiga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	485.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salatiga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	485.000.000	
7.2	Pemeliharaan Mebel	Salatiga	Jumlah Mebel yang dipelihara	2 unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Salatiga	Jumlah Mebel yang dipelihara	2 unit	5.000.000	
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 unit	295.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 unit	295.000.000	
7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 paket	50.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 paket	50.000.000	
7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 paket	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 paket	25.000.000	

No	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8	9	10	11	12
7.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	25.000.000	
8	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	15.075.000.000	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	15.075.000.000	
8.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Salatiga	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 org	14.750.000.000	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Salatiga	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 org	14.750.000.000	
8.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Salatiga	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 paket	250.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Salatiga	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 paket	250.000.000	
8.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Salatiga	Jumlah paket Medical Check Up yang disediakan	1 paket	75.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Salatiga	Jumlah paket Medical Check Up yang disediakan	1 paket	75.000.000	
9	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD		Capaian Layanan Administrasi DPRD		609.000.000	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD		Capaian Layanan Administrasi DPRD		609.000.000	
9.1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 lap	70.000.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 lap	70.000.000	
9.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Salatiga	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 paket	539.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Salatiga	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 paket	539.000.000	
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				18.452.500.000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		18.452.500.000	
			Tingkat capaian kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %				Tingkat capaian kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %		
10	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	4.080.000.000	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	4.080.000.000	
10.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dok	5.000.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dok	5.000.000	
10.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	4 dok	800.000.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	4 dok	800.000.000	
10.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Salatiga	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 dok	2.750.000.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Salatiga	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 dok	2.750.000.000	
10.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 dok	525.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 dok	525.000.000	
11	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	140.000.000	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	140.000.000	
11.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dok	35.000.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dok	35.000.000	

No	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Pening
	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8	9	10	11	12
11.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dok	25.000.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dok	25.000.000	
11.3	Pembahasan APBD	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dok	30.000.000	Pembahasan APBD	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dok	30.000.000	
11.4	Pembahasan APBD Perubahan	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 dok	30.000.000	Pembahasan APBD Perubahan	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 dok	30.000.000	
11.5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dok	20.000.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dok	20.000.000	
12	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah		Capaian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100 %	162.500.000	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah		Capaian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100 %	162.500.000	
12.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 lap	20.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 lap	20.000.000	
12.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 lap	15.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 lap	15.000.000	
12.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 lap	17.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 lap	17.500.000	
12.4	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dok	50.000.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dok	50.000.000	
12.5	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 dok	5.000.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 dok	5.000.000	
12.6	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Salatiga	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 lap	55.000.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Salatiga	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 lap	55.000.000	
13	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Capaian Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	3.357.500.000	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Capaian Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	3.357.500.000	
13.1	Pendalaman Tugas DPRD	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 dok	1.000.000.000	Pendalaman Tugas DPRD	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 dok	1.000.000.000	
13.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Salatiga	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 dok	1.017.500.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Salatiga	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 dok	1.017.500.000	
13.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Salatiga	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4 org	200.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Salatiga	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4 org	200.000.000	
13.4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Salatiga	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 org	170.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Salatiga	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 org	170.000.000	
13.5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 dok	750.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 dok	750.000.000	

No	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8	9	10	11	12	
13.6	Penyusunan Program Kerja DPRD	Salatiga	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dok	220.000.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Salatiga	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dok	220.000.000		
14	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Capaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	757.500.000	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Capaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	757.500.000		
14.1	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Salatiga	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dok	7.500.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Salatiga	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dok	7.500.000		
14.2	Pelaksanaan Reses	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 dok	750.000.000	Pelaksanaan Reses	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 dok	750.000.000		
15	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Capaian Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	10.000.000	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Capaian Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	10.000.000		
15.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Salatiga	Jumlah Kode Etik DPRD	1 lap	5.000.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Salatiga	Jumlah Kode Etik DPRD	1 lap	5.000.000		
15.2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 lap	5.000.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 lap	5.000.000		
16	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah		Capaian Pembahasan Kerja Sama Daerah	100 %	2.000.000	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah		Capaian Pembahasan Kerja Sama Daerah	100 %	2.000.000		
16.1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 dok	1.000.000	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 dok	1.000.000		
16.2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Salatiga	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 dok	1.000.000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Salatiga	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 dok	1.000.000		
17	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Capaian Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	9.943.000.000	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Capaian Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	9.943.000.000		
17.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 dok	9.733.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 dok	9.733.000.000		
17.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Salatiga	Jumlah laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 lap	50.000.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Salatiga	Jumlah laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 lap	50.000.000		
17.3	Fasilitasi Pelaksaaan Tugas Badan Musyawarah	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 dok	15.000.000	Fasilitasi Pelaksaaan Tugas Badan Musyawarah	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 dok	15.000.000		
17.4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 dok	140.000.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 dok	140.000.000		
17.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 dok	5.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 dok	5.000.000		
					43.543.548.000						43.543.548.000	

Untuk menjawab tantangan tersebut, analisis kebutuhan tahun 2026 diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan dukungan teknis, serta pemanfaatan sistem kerja yang lebih adaptif. Rangkuman hasil review RKPD 2025 beserta analisis kebutuhan 2026 disajikan pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.6
Review terhadap RKPD Kota Salatiga Tahun 2025 dan Analisis Kebutuhan Sekretariat DPRD Tahun 2026

No	Program/Kegiatan RKPD 2025	Target Kinerja 2025	Realisasi/ Capaian 2025	Permasalahan	Analisis Kebutuhan 2026 (Mengacu Renstra 2025–2029)
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Fasilitasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD tercapai 100%	88–95% (produk hukum, rapat, dan fasilitasi fungsi belum sepenuhnya optimal)	Terbatasnya tenaga ahli dengan kompetensi sesuai kebutuhan DPRD	Peningkatan kapasitas SDM, penambahan tenaga ahli bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan
2	Kegiatan Fasilitasi Perancangan Produk Hukum Daerah	Seluruh produk hukum daerah didampingi tenaga ahli	Baru 88% produk hukum yang terfasilitasi	Keterbatasan tenaga ahli dan koordinasi dengan OPD pengusul	Optimalisasi fasilitasi legislasi melalui rekrutmen/kerja sama tenaga ahli dan peningkatan koordinasi
3	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Penetapan APBD	APBD ditetapkan tepat waktu	Terdapat keterlambatan pembahasan	Dokumen pendukung dari eksekutif terlambat, fasilitasi teknis kurang	Penguatan koordinasi lintas OPD, peningkatan kapasitas fasilitasi pembahasan APBD
4	Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100% laporan hasil pengawasan terdokumentasi	Baru 80% laporan pengawasan terlaksana optimal	Belum semua rekomendasi DPRD ditindaklanjuti	

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan direncanakan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga membuka ruang partisipasi dari para pemangku kepentingan, baik melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, maupun melalui mekanisme hibah/bantuan sosial yang diatur peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelaahan, pada Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kota Salatiga tidak menerima usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan dari pemangku kepentingan, baik yang berasal dari DPRD, kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun stakeholder lainnya. Hal ini dikarenakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD lebih bersifat administratif dan mendukung pelaksanaan fungsi DPRD (legislasi, penganggaran, dan pengawasan), sehingga usulan masyarakat secara langsung jarang muncul pada perangkat daerah ini.

Dengan demikian, arah program dan kegiatan Sekretariat DPRD tetap disusun mengacu pada hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, isu strategis perangkat daerah, serta prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 dan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029.

Tabel 2.7 (T-C.32)
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaahan Kebijakan Nasional

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah dalam periode perencanaan 2025–2029. Pada tingkat nasional, kebijakan berorientasi pada Visi Indonesia Emas 2045 dan RPJMN 2025–2029 yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Pada tingkat provinsi, arah pembangunan Jawa Tengah difokuskan pada tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik, serta optimalisasi peran DPRD. Sementara pada tingkat kota, RPJMD Kota Salatiga 2025–2029 menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel, serta penguatan kapasitas kelembagaan DPRD.

Kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025–2045 serta RPJMN 2025–2029 menekankan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan demokrasi, dan keberlanjutan Reformasi Birokrasi. Arah kebijakan ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah maupun tahunan.

Sejalan dengan hal tersebut, RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029 mengarahkan pembangunan daerah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel, serta pengembangan kapasitas demokrasi lokal. Dalam kerangka tersebut, Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 disusun untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD melalui penyediaan fasilitasi kelembagaan, administratif, dan teknis bagi DPRD.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2026, dilakukan penelaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi, serta kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029. Telaahan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan, program, dan kegiatan Sekretariat DPRD dengan arah pembangunan yang lebih tinggi tingkatannya.

Arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 menekankan pada transformasi ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif, dari arah kebijakan tersebut, Sekretariat DPRD Kota Salatiga memiliki relevansi dalam mendukung agenda nasional, khususnya pada:

1. Penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, melalui peningkatan efektivitas pelayanan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, melalui penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD yang tertib, efisien, dan sesuai prinsip *good governance*.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, dalam rangka mendukung kelembagaan DPRD yang adaptif dan profesional.

Dengan demikian, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional dalam bidang tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.1.2. Telaahan Kebijakan Provinsi

Sejalan dengan salah satu Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2029 yang kemudian diturunkan kedalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Dokumen RPJMD tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan diturunkan lebih lanjut dalam Renja Perangkat Daerah, termasuk Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026. Dengan demikian, perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD difokuskan pada penyediaan dukungan administratif, teknis, dan kelembagaan bagi DPRD agar mampu melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara efektif, transparan, dan akuntabel, sesuai arah kebijakan pembangunan Kota Salatiga tahun 2025–2029.

Selanjutnya, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025–2029 menitikberatkan pada:

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
3. Penguatan nilai-nilai kebangsaan dan partisipasi masyarakat; serta
4. Peningkatan sinergi pembangunan antarwilayah dan antarlevel pemerintahan.

Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD Kota Salatiga berperan dalam mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah, terutama pada aspek:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah, melalui penyediaan layanan administrasi DPRD yang profesional dan akuntabel;
2. Peningkatan kualitas aparatur dan kelembagaan, guna memperkuat kapasitas DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; serta
3. Fasilitasi komunikasi dan koordinasi antara DPRD dan pemangku kepentingan lintas wilayah, untuk mendukung sinergi pembangunan provinsi dan kabupaten/kota.

Sekretariat DPRD dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029 termasuk dalam Misi ke-3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif terhadap Pelayanan Publik yang Berkualitas melalui peningkatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur, mengacu pada misi tersebut rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD;
2. Mengoptimalkan fasilitasi koordinasi dan kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah;
3. Memperkuat sistem tata kelola kesekretariatan yang efektif, efisien, dan berbasis digital;
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat DPRD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025–2029. Dokumen ini sekaligus menjadi instrumen operasional tahunan yang memastikan keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kelancaran tugas dan fungsi DPRD.

Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029 yaitu *"Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD"*, dengan Indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasarannya adalah *"Meningkatnya Kinerja Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD"* dengan Indikator Tingkat Kenaikan Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Perumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator
Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Satuan
Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	84,75	Indeks
	Meningkatnya Kinerja Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kenaikan Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	0,25	%

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025

Tujuan pembangunan perangkat daerah Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 diarahkan pada peningkatan kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Hal ini diwujudkan melalui penguatan pelayanan administratif, fasilitasi persidangan, penyediaan data dan informasi, serta dukungan teknis lainnya yang relevan dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Sasaran yang ditetapkan mencerminkan orientasi pada kualitas layanan, yaitu meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan, dengan target capaian sebesar 84,75. Target ini menunjukkan adanya peningkatan standar layanan, mengingat indeks kepuasan merupakan ukuran penting dalam menilai kinerja dukungan Sekretariat DPRD.

Selain itu, terdapat sasaran terkait peningkatan kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, yang diukur melalui tingkat kenaikan indeks kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Target kenaikan yang ditetapkan sebesar 0,25% menunjukkan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam kualitas pelayanan.

Dengan menetapkan indikator berbasis kepuasan pengguna layanan (anggota DPRD), maka kinerja Sekretariat DPRD dapat diukur secara lebih objektif dan berorientasi hasil (outcome). Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Sekretariat DPRD

Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029 serta ketentuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga 2025–2029. Perumusan program dan kegiatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut:

1. Faktor Regulasi dan Kebijakan Program dan kegiatan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, arahan kebijakan nasional, provinsi, dan kota, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Fokus utama diarahkan pada dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
3. Kebutuhan Riil DPRD Penyusunan program dan kegiatan didasarkan pada kebutuhan faktual DPRD, baik dari aspek kelembagaan, administrasi, keuangan, maupun penyediaan sarana prasarana.

4. Ketersediaan Anggaran dan Prioritas Pembangunan Program dan kegiatan disesuaikan dengan pagu indikatif, memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Secara garis besar, program Sekretariat DPRD Tahun 2026 meliputi Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, yang terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan terkait fasilitasi rapat-rapat DPRD, penyediaan tenaga ahli, pengelolaan administrasi, pelayanan keuangan DPRD, serta pengelolaan rumah tangga DPRD. Jumlah kegiatan dan sub kegiatan yang dirumuskan telah mengacu pada struktur program dalam Renstra Sekretariat DPRD 2025–2029, dengan penyesuaian seperlunya sesuai kebutuhan dan perkembangan dinamika DPRD.

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Salatiga pada tahun 2026 dirumuskan berdasarkan beberapa faktor, yaitu hasil telaah kebijakan nasional, telaah tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD, telaah RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029, serta hasil analisis kebutuhan pelaksanaan tugas pada tahun 2026. Program dan kegiatan yang dirumuskan dipusatkan pada upaya peningkatan kualitas fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta penguatan kapasitas kelembagaan DPRD Kota Salatiga.

Selanjutnya, program dan kegiatan disusun menurut urusan pemerintahan daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program prioritas Sekretariat DPRD Kota Salatiga pada tahun 2026 difokuskan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan outcome utama berupa meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal, transparan, dan akuntabel. Program ini dirancang untuk memastikan DPRD dapat menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan program prioritas dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025–2029, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Menindaklanjuti arah kebijakan tersebut, Sekretariat DPRD menetapkan dukungan terhadap prioritas pembangunan daerah melalui pelaksanaan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program ini menjadi instrumen utama dalam memperkuat kapasitas DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, agar pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat berjalan optimal, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, rangkaian program dan kegiatan prioritas Sekretariat DPRD pada tahun 2026 ini mencerminkan peran strategis Sekretariat sebagai Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD. Implementasi program diharapkan untuk:

1. Meningkatkan kualitas legislasi daerah yang berpihak pada kepentingan publik;
2. Memperkuat peran DPRD dalam proses penganggaran daerah;
3. Mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif.

Kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Keselarasan Arah Kebijakan RPJMD, Program Unggulan Wali Kota,
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas Sekretariat DPRD

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMN/ RPJMD PROVINSI/RPJMD KOTA SALATIGA	Program Unggulan Wali Kota	Program Prioritas Perangkat Daerah	Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah
1	2	3	4		5
1	Penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi	-	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran 3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	1. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 3. Sub Kegiatan asilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan/dan/atau Naskah Akademik. 4. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS 5. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 6. Sub Kegiatan Pembahasan APBD 7. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan 8. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 9. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintah dan Hukum
2	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi				
3	Meningkatkan efektivitas kinerja kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah, serta mendukung efektivitas pelayanan publik				

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMN/ RPJMD PROVINSI/RPJMD KOTA SALATIGA	Program Unggulan Wali Kota	Program Prioritas Perangkat Daerah	Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah
1	2	3	4		5
					10. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 11. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025

1. Fungsi Legislasi (Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD)
Melalui kegiatan ini, DPRD difasilitasi dalam penyusunan, pembahasan, serta pengkajian berbagai instrumen hukum daerah yang mendukung arah kebijakan pembangunan. Sub kegiatan seperti penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), pembahasan Raperda, kajian perundang-undangan, serta fasilitasi naskah akademik menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan regulasi di tingkat nasional.
2. Fungsi Anggaran (Pembahasan Kebijakan Anggaran) dengan Kegiatan pembahasan anggaran diarahkan untuk menjamin konsistensi antara kebijakan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah. Sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembahasan KUA-PPAS, perubahan KUA-PPAS, APBD, APBD Perubahan, hingga pertanggungjawaban APBD. Proses ini menjadi sarana penting bagi DPRD dalam memastikan bahwa alokasi anggaran daerah berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, efisiensi belanja daerah, serta pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Salatiga 2025–2029.
3. Fungsi Pengawasan (Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan), dengan difasilitasi melalui kegiatan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah, yang mencakup bidang pemerintahan dan hukum, infrastruktur, perekonomian, serta penggunaan anggaran. Selain itu, kegiatan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah juga menjadi momentum evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Sub kegiatan ini penting untuk memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan serta menjaga agar pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Kota Salatiga disajikan dalam tabel 3.3 (T-C.33) berikut ini:

Tabel 3.3 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Salatiga

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Salatiga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				43.543.548.000				47.050.000.000
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/ KOTA ATAU PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitas Pelayanan Kesekretariatan		85,00 %	25.091.048.000			85,00 %	27.303.500.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		87,50 %				87,50 %	
4.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	6.000.000	APBD		100 %	6.000.000
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Salatiga	10 lap	6.000.000	APBD		10 lap	6.000.000
4.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	5.216.048.000	APBD		100 %	4.027.500.000
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Salatiga	28 org	3.574.048.000	APBD		28 org	4.000.000.000
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Salatiga	1 dok	1.642.000.000	APBD		1 dok	27.500.000
4.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD		100 %	65.000.000	APBD		100 %	75.000.000
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Salatiga	1 dok	65.000.000	APBD		1 dok	75.000.000
4.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	2.480.000.000	APBD		100 %	2.685.000.000
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Salatiga	4 paket	15.000.000	APBD		4 paket	15.000.000
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Salatiga	4 paket	50.000.000	APBD		4 paket	50.000.000
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Salatiga	4 paket	15.000.000	APBD		4 paket	20.000.000
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Salatiga	4 paket	50.000.000	APBD		4 paket	50.000.000
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Salatiga	4 paket	30.000.000	APBD		4 paket	30.000.000
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Salatiga	1 dok	20.000.000	APBD		1 dok	20.000.000
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Salatiga	1 lap	500.000.000	APBD		1 lap	500.000.000
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Salatiga	1 lap	1.800.000.000	APBD		1 lap	2.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintahan	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		100 %	100.000.000	APBD		100 %	200.000.000
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Salatiga	5 unit	100.000.000	APBD		5 unit	200.000.000
4.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah		100 %	655.000.000	APBD		100 %	1.905.000.000
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	1 lap	5.000.000	APBD		1 lap	5.000.000
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Salatiga	1 lap	450.000.000	APBD		1 lap	450.000.000
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Pelayanan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Salatiga	1 lap	200.000.000	APBD		1 lap	200.000.000
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Salatiga	1 lap	-	APBD		1 lap	1.250.000.000
4.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	885.000.000	APBD		100 %	1.055.000.000
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Salatiga	18 unit	485.000.000	APBD		18 unit	450.000.000
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipeliharani	Salatiga	2 unit	5.000.000	APBD		2 unit	10.000.000
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Salatiga	5 unit	295.000.000	APBD		5 unit	295.000.000
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Salatiga	2 paket	50.000.000	APBD		2 paket	100.000.000
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Salatiga	4 paket	25.000.000	APBD		4 paket	100.000.000
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Salatiga	1 paket	25.000.000	APBD		1 paket	100.000.000
4.02.01.2.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100 %	15.075.000.000	APBD		100 %	16.300.000.000
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Salatiga	25 org	14.750.000.000	APBD		25 org	15.950.000.000
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Salatiga	2 paket	250.000.000	APBD		2 paket	250.000.000
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah paket Medical Check Up yang disediakan	Salatiga	1 paket	75.000.000	APBD		1 paket	100.000.000
4.02.01.2.16	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Capaian Layanan Administrasi DPRD			609.000.000	APBD			1.050.000.000
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Salatiga	1 lap	70.000.000	APBD		1 lap	100.000.000
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Salatiga	4 paket	539.000.000	APBD		4 paket	950.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		100	%	18.452.500.000			100	%	19.746.500.000
		Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi		100	%				100	%	
		Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran		100	%				100	%	
		Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan		100	%				100	%	
4.02.02.2.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100	%	4.080.000.000	APBD		100	%	4.617.500.000
4.02.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Salatiga	1	dok	5.000.000	APBD		1	dok	17.500.000
4.02.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Salatiga	4	dok	800.000.000	APBD		4	dok	800.000.000
4.02.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Salatiga	4	dok	2.750.000.000	APBD		4	dok	3.000.000.000
4.02.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Salatiga	4	dok	525.000.000	APBD		4	dok	800.000.000
4.02.02.2.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran		100	%	140.000.000	APBD		100	%	155.000.000
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Salatiga	1	dok	35.000.000	APBD		1	dok	35.000.000
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Salatiga	1	dok	25.000.000	APBD		1	dok	40.000.000
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Salatiga	1	dok	30.000.000	APBD		1	dok	30.000.000
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Salatiga	1	dok	30.000.000	APBD		1	dok	25.000.000
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Salatiga	1	dok	20.000.000	APBD		1	dok	25.000.000
4.02.02.2.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaeraan Pemerintah	Capaian Pengawasan Penyelenggaeraan Pemerintah	Salatiga	100	%	162.500.000	APBD		100	%	185.000.000
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintah dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Salatiga	1	lap	20.000.000	APBD		1	lap	50.000.000
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Salatiga	1	lap	15.000.000	APBD		1	lap	10.000.000
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Salatiga	1	lap	17.500.000	APBD		1	lap	10.000.000
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Salatiga	1	dok	50.000.000	APBD		1	dok	50.000.000
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Salatiga	1	dok	5.000.000	APBD		1	dok	10.000.000
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Salatiga	1	lap	55.000.000	APBD		1	lap	55.000.000
4.02.02.2.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Peningkatan Kapasitas DPRD	Salatiga	100	%	3.357.500.000	APBD		100	%	3.675.000.000
4.02.02.2.04.0001	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Salatiga	1	dok	1.000.000.000	APBD		1	dok	1.000.000.000
4.02.02.2.04.0002	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Salatiga	1	dok	1.017.500.000	APBD		1	dok	1.300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Salatiga	4	org	200.000.000	APBD		4	org	200.000.000
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Salatiga	5	org	170.000.000	APBD		5	org	175.000.000
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Salatiga	1		750.000.000	APBD		1		750.000.000
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Salatiga	1		220.000.000	APBD		1		250.000.000
4.02.02.2.04.0008	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Salatiga	100	%	757.500.000	APBD		100	%	759.000.000
4.02.02.2.05	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Salatiga	1		7.500.000	APBD		1		9.000.000
4.02.02.2.05.0002	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Salatiga	1		750.000.000	APBD		1		750.000.000
4.02.02.2.05.0003	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Salatiga	100	%	10.000.000	APBD		100	%	20.000.000
4.02.02.2.06	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik DPRD	Salatiga	1	lap	5.000.000	APBD		1	lap	10.000.000
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Salatiga	1	lap	5.000.000	APBD		1	lap	10.000.000
4.02.02.2.07	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Capaian Pembahasan Kerja Sama Daerah	Salatiga	100	%	2.000.000	APBD		100	%	20.000.000
4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Salatiga	1	dok	1.000.000	APBD		1	dok	10.000.000
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Salatiga	1	dok	1.000.000	APBD		1	dok	10.000.000
4.02.02.2.08	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Fasilitasi Tugas DPRD	Salatiga	100	%	9.943.000.000	APBD		100	%	10.315.000.000
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Salatiga	1	dok	9.733.000.000	APBD		1	dok	10.085.000.000
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Salatiga	1	lap	50.000.000	APBD		1	lap	50.000.000
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksaasn Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Salatiga	1	dok	15.000.000	APBD		1	dok	20.000.000
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Salatiga	1	dok	140.000.000	APBD		1	dok	140.000.000
4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Salatiga	1	dok	5.000.000	APBD		1	dok	20.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 didasarkan pada arah kebijakan pembangunan daerah serta hasil telaahan terhadap kebutuhan riil Sekretariat DPRD. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara optimal, meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Uraian mengenai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 merupakan instrumen strategis dalam rangka pemenuhan kinerja urusan yang menjadi tugas Sekretariat DPRD Kota Salatiga, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Rencana program dan kegiatan tersebut disusun berdasarkan hasil telaahan kebijakan, arah pembangunan daerah, serta kebutuhan riil Sekretariat DPRD pada tahun perencanaan.

Rencana pendanaan disusun dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, setiap kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai target kinerja yang ditetapkan, serta diarahkan untuk memperkuat fasilitasi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

4.1. Rencana Program Sekretariat DPRD

Program Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 terdiri dari 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan prioritas Kegiatan:

1. Fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat DPRD.
2. Dukungan administrasi dan keuangan DPRD.
3. Pengelolaan kepegawaian, sarana prasarana, serta layanan umum Sekretariat DPRD.
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis.
6. Fasilitasi kegiatan reses, kunjungan kerja, konsultasi, dan koordinasi DPRD dengan pemangku kepentingan daerah maupun nasional.
7. Dukungan partisipasi DPRD dalam forum koordinasi kelembagaan, seperti ADEKSI/ASDEKSI.
8. Fasilitasi kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah.
9. Fasilitasi pengawasan pelaksanaan APBD.
10. Dukungan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat.

Kebutuhan pendanaan Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 dihitung berdasarkan usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan pagu indikatif yang tersedia. Pendanaan difokuskan pada:

1. Belanja operasional, meliputi dukungan administrasi, keuangan, dan layanan umum Sekretariat DPRD.
2. Belanja fasilitasi DPRD, untuk mendukung kelancaran rapat, reses, kunjungan kerja, pembahasan ranperda, serta koordinasi dengan pihak eksternal.
3. Belanja pengembangan kapasitas, untuk peningkatan kompetensi SDM dan penguatan kelembagaan DPRD.
4. Belanja pemeliharaan sarana prasarana, guna menjamin kenyamanan, kelayakan, dan keberlanjutan operasional Sekretariat DPRD.

4.2. Rencana Kegiatan Sekretariat DPRD

Rencana kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 disusun sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan, strategi, dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya yang terkait dengan fasilitasi pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD. Rencana kegiatan ini berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya Sekretariat DPRD. Kegiatan yang direncanakan meliputi:

1. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, berupa dukungan teknis, administrasi, serta penyediaan sarana prasarana untuk menunjang fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.
2. Penyelenggaraan Rapat, Sidang, dan Kegiatan DPRD, yang difokuskan pada peningkatan kualitas penyusunan produk hukum daerah serta efektivitas proses pembahasan kebijakan daerah.

3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, melalui kegiatan bimbingan teknis, kunjungan kerja, serta kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan dengan tugas dan kewenangan DPRD.
4. Penguatan Tata Kelola dan Administrasi Sekretariat DPRD, termasuk pengelolaan keuangan, kepegawaian, arsip, serta sistem informasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja.
5. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana, untuk mendukung kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas DPRD maupun aparatur sekretariat.
6. Kegiatan Pendukung Lainnya, seperti dokumentasi, publikasi, serta hubungan kelembagaan dengan pemangku kepentingan guna meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.

Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan Sekretariat DPRD mampu memberikan dukungan yang optimal terhadap kinerja DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, demokratis, dan berorientasi pada pelayanan publik.

4.3. Rencana Sub Kegiatan Sekretariat DPRD

Rencana Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 merupakan penjabaran lebih rinci dari rencana kegiatan yang telah disusun, dengan fokus pada pelaksanaan dukungan teknis, administratif, dan operasional bagi DPRD. Sub kegiatan ini diarahkan untuk memastikan setiap fungsi DPRD legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat berjalan secara optimal, efisien, dan akuntabel. Sub kegiatan yang direncanakan meliputi antara lain:

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Paripurna, Rapat Alat Kelengkapan, dan Rapat Pimpinan DPRD, yang difokuskan pada tersedianya dukungan teknis dan administrasi rapat agar proses pembahasan kebijakan daerah berjalan lancar dan sesuai prosedur.
2. Sub Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah, yang mendukung proses legislasi berupa penyusunan, pembahasan, hingga evaluasi rancangan peraturan daerah dan keputusan DPRD.
3. Sub Kegiatan Fasilitasi Reses dan Kunjungan Kerja DPRD, yang mendukung pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat dan kunjungan kerja sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
4. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Orientasi, dan Pengembangan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, yang bertujuan meningkatkan kompetensi,

- pemahaman regulasi, serta wawasan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
5. Sub Kegiatan Pelayanan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi dukungan keprotokolan, perjalanan dinas, penyediaan tenaga ahli, serta layanan administrasi lainnya.
 6. Sub Kegiatan Penunjang Operasional Sekretariat DPRD, seperti pengelolaan keuangan, kepegawaian, persuratan, arsip, publikasi kegiatan, dan hubungan kelembagaan dengan pemangku kepentingan.
 7. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Penunjang DPRD, guna menyediakan fasilitas kerja yang representatif, nyaman, dan mendukung kinerja DPRD maupun sekretariat.

Pelaksanaan sub kegiatan tersebut menjadi instrumen penting dalam mendukung tercapainya tujuan program Sekretariat DPRD, sekaligus memastikan agar fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

4.4. Target Kinerja Beserta Pendanaan

Rumusan rencana program, jumlah kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2026 ditampilkan dalam tabel yang memuat Kode, Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, serta Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif. Data tersebut bersumber dari hasil penginputan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD-RI) melalui alamat <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>, Tabel 4.1 Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DPRD						43.543.548.000,00							47.003.500.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						43.543.548.000,00							47.003.500.000,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						43.543.548.000,00							47.003.500.000,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						25.091.048.000,00						-	27.257.000.000,00	
		[Meningkatkan dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100 75.00 88.00	100 72.00 84.07	100 72.50 85.00	100 73.00 86.00	25.091.048.000,00	-	-	-	-	-	-	27.257.000.000,00	-
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga	-	6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	6.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	5.216.048.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga	-	5.642.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	3.574.048.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1.642.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		1.642.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	-			100 %	65.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga	-	75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	65.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	2.480.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga	-	2.685.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	15.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	50.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	15.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	50.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	30.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	500.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1.800.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	-			100 %	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga	-	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	100.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah</i>	-			100 %	655.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga	-	655.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	450.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	885.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga	-	1.055.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	485.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	295.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		295.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	50.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	25.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-			100 %	15.075.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga	-	16.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	14.750.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		15.950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				2 Paket	250.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	75.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Capaian Layanan Administrasi DPRD	-			100 %	609.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga	-	639.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	70.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan</i>				4 Paket	539.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		539.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						18.452.500.000,00						-	19.746.500.000,00	
		[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangandan kualitas penganggaran dan pengawasan]	Tingkat capaian kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	100	100	100	18.452.500.000,00	-	-	-	-	-	-	19.746.500.000,00	-
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>	-			100 %	4.080.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga	-	4.617.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		17.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				4 Dokumen	800.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				4 Dokumen	2.750.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	525.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran	-			100 %	140.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga	-	155.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Pengawasan Penyeleng garaan Pemerintah	-			100 %	162.500.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 12 Peningk atan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga	-	185.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 12 Peningk atan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 12 Peningk atan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	17.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>				1 Dokumen	55.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Capaian Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	-			100 %	3.357.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga	-	3.675.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				4 Orang	200.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	170.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	750.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	220.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	1.017.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-			100 %	757.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga	-	759.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	7.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		9.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				1 Dokumen	750.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga	-	20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Capaian Pembahasan Kerja Sama Daerah	-			100 %	2.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga	-	20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Fasilitasi Tugas DPRD	-			100 %	9.943.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga	-	10.315.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	9.733.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		10.085.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	140.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		140.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Sekretariat DPRD Kota Salatiga		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H							43.543.548.000,00							47.003.500.000,00	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan disusun selaras dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025–2029. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja ini berfungsi mengarahkan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD agar berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

A. Kesimpulan Umum

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 disusun berdasarkan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029, Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029, serta hasil analisis kebutuhan pelayanan. Melalui dokumen ini, Sekretariat DPRD diharapkan mampu:

1. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif dan efisien;
2. Mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang partisipatif, akuntabel, dan transparan;
3. Menjadi instrumen operasional yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan pelayanan serta ketersediaan anggaran daerah.

B. Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026, terdapat kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Seluruh ASN dan staf Sekretariat DPRD wajib melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;
2. Perencanaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan keterpaduan, sinergitas, serta konsistensi dengan dokumen perencanaan daerah;
3. Pelaksanaan kegiatan harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas;
4. Setiap perubahan kebutuhan atau kebijakan akan diakomodasi melalui mekanisme Perubahan Renja sesuai ketentuan yang berlaku.

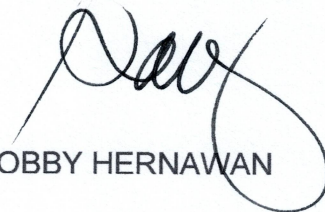
C. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi

Sebagai instrumen pengendalian pembangunan tahunan daerah, Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 akan dilaksanakan dengan mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagai berikut:

1. Monitoring secara rutin oleh Sekretariat DPRD terhadap capaian pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran;
2. Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik, baik triwulanan maupun tahunan, untuk menilai ketercapaian indikator kinerja program dan kegiatan;
3. Penyusunan laporan kinerja yang disampaikan kepada Bappeda, BPKPD, dan Inspektorat sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
4. Hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Perubahan Renja maupun perencanaan tahun berikutnya dalam kerangka RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029.

Akhirnya, dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 diharapkan dapat berjalan dengan optimal sehingga mampu meningkatkan kinerja kelembagaan DPRD serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029.

WALI KOTA SALATIGA



ROBBY HERNAWAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

Pada hari ini Selasa tanggal Empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima, telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan Renja Sekretariat Deawan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan hasil sebagai berikut :

- Kesatu : sistematika penulisan Renja berpedoman dengan ketentuan pada pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, paling sedikit memuat :
1. Pendahuluan;
 2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 5. Penutup.
- Kedua : melakukan penyempurnaan rancangan Renja Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi penyempurnaan rancangan Renja sesuai saran dan masukan Tim sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen rancangan akhir Renja Tahun 2026 kepada Kepala BAPPEDA Kota Salatiga paling lambat 2 minggu setelah Perkada RKPD di tetapkan.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Salatiga



Dra. SRI SATUTI., M.M.
NIP. 19670802 199403 2 007

Koordinator Tim Verifikasi Bidang
Kesejahteraan Masyarakat
Kabid Perenc. Kesra BAPPEDA
Kota Salatiga



AZIS MUSLIM, SE, MM
NIP. 197402172005011005

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
Kebijakan Renja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓		Sudah ada	
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓		Sudah ada	
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓		Sudah ada	
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓		Sudah sesuai	
8.	Penelaahan usulan masyarakat.		✓	Nihil	
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	✓		Ada	Hal 45-46
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		✓	Nihil	
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.		✓	Akan di sahkan setelah perbaikan ini	

Lampiran 2 :
Berita Acara Hasil Verifikasi Renja PD
Tahun 2026

Formulir E.71
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.	Sudah ada rumusan, tapi acuan dokumen di atasnya sudah yang terbaru dengan periode 25-29
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Untuk program kegiatan mendukung prioritas kota, prov dan nasional sudah ada

Formulir Verifikasi Sistematika Renja PD Tahun 2026
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
I.1	Latar belakang	Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja PD Tahun 2026 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja PD	✓		begitu juga dengan Tingkat Kota berdasarkan RPJMD dan renstra 25-29 (Sudah TL di hal 1) Acuan dokumen prov Adalah RPJMD 25-29 bukan RPD,
I.2	Dasar hukum penyusunan	Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2026, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.	✓		- Tambahkan perwali nomor 25 tahun 2025 tentang RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 - Tambahkan perda provinsi jawa tengah tentang RPJPD - Tambahkan perda kota salatiga tentang RPJPD - Perda yang tidak berlaku agar dihapus - Perda Prov 7/2025 ttg RPJMD 25-29 (Sudah TL di hal 4)
I.3	Maksud dan tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renja PD	✓		Sesuaikan tahun pada dokumen acuan 25-29 (Sudah TL di hal 5)
I.4	Sistematika penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renja PD	✓		Cek Kembali capaian indikator kinerja Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029 belum ada dan sub bab 2.4 Review terhadap RKPD (Sudah TL di hal 6)
II.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 & Capaian Renstra PD Tahun 2024	Tabel evaluasi Renja Tahun 2024 Tabel T-C. 29	✓		Konten narasi berupa realisasi dari tahun 2023 harap disesukan menjadi tahun 2024

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
					- lengkapi dengan tabel T-C.29 (Sudah TL di hal 14)
II.2	Analisa Kinerja Pelayanan	IKU, SPM, IKK, Uraian Indikator yang belum memenuhi target Tabel T-C. 30	✓		Lengkapi dengan ketentuan dan tabel T-C.30 (Sudah TL di hal 22)
II.3	Permasalahan dan Isu Strategis PD	1. Sejauh mana Tingkat kinerja PD dan hal kritis terkait pelayanan; 2. Permasalahan dan hambatan yg dihadapi; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi KaDa, tuj dan sasaran Pemda dan program prioritas; 4. Tantangan dan peluang; 5. Formulasi isu penting berupa rekomendasi dan catatan dalam perumusan program dan kegiatan priotas tahun n.	✓		Belum ada Permasalahan dan Perumusan isu strategis (Sudah TL di hal 24)
		Isu strategis sesuai dengan menyimpulkan dari: a. Permasalahan b. Indikator yang belum dicapai	✓		Belum ada (Sudah TL di hal 26)
II.4	Review terhadap RKPD	Tabel review RKPD dan Analisis Kebutuhan Tabel T-C. 31	✓		Pagu dari RKPD 2026 (43.543.548.000,00) dan kinerja dari Renstra 2025-2029 yang menjadi acuan (Sudah TL di hal 31)
II.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; Tabel T-C.32	✓		Lengkapi dengan data usulan dari Pokir, Musrenbang maupun Hibah. (Sudah TL di hal 37 tidak ada usulan)
III.1	Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.	✓		Sesuaikan periodesasi acuan dokumen di atasnya, menggunakan

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
					dokumen 25-29. Dijelaskan lebih rinci dari beberapa arah kebijakan dan prioritas pilih yang di dukung oleh OPD anda Acuan Nasional, Provinsi serta RPJMD kota (Sudah TL di hal 38)
III.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2026	Tujuan dan sasaran mengacu pada dokumen Renstra 2025–2029	✓		Sesuaikan dengan tujuan dan sasaran Renstra 25-29 beserta dengan indikator kinerjanya (Sudah TL di hal 39)
III.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada dokumen Renstra 2025–2029 Berisikan Penjelasan mengenai: 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan; 3. Penjelasan jika rumusan program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; 4. Melampirkan rencana program dan kegiatan berdasarkan pengerjaan tabel T-C.33	✓		Narasi masih tahun 2025, lengkapi dengan ketentuan (Sudah TL di hal 33)
IV.1	Rencana Kerja dan Pendanaan	beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif (cetak renja dari SIPD RI)	✓		
V	Penutup	Bab ini memuat diantaranya 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 3. Rencana tindak lanjut.	✓		- Renstra 23-26 sudah tidak di gunakan lagi (Sudah TL di hal 79)